

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam dunia usaha yang pesat pada era globalisasi saat ini mengakibatkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang siap bersaing dengan perusahaan yang telah ada. Perusahaan yang baru tersebut ada yang berasal dan berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud* (Kecurangan). Masalah-masalah *fraud* yang muncul dalam perusahaan merupakan tanda bahwa terdapat fungsi di dalam perusahaan yang tidak dilaksanakan secara taat dan konsisten, dampaknya tata kelola perusahaan menjadi tidak sehat (Suginam, 2016).

Fraud (kecurangan) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam organisasi dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau sekelompok orang. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:1) yang mendefinisikan kecurangan sebagai “konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang

dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.

Sebelum kecurangan terjadi, maka kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi terjadinya *fraud* (Iqbal, 2010).

Fraud deterrence (Pencegahan kecurangan) terdiri atas segala upaya yang dikerahkan untuk membuat pelaku *fraud* tidak berani melakukan ataupun kalau *fraud* terjadi maka dampaknya diharapkan sangat minim. Mekanisme untuk mencegah *fraud* adalah kontrol dan yang paling bertanggung jawab atas control adalah manajemen (SPAI, 2004:65 dalam Budi Fahreza, 2014).

Namun saat ini lemahnya pencegahan *fraud* di dalam perusahaan di Indonesia masih banyak terjadi dan menyebabkan semakin banyaknya kecurangan yang terjadi.

Contoh fenomena lemahnya pencegahan *fraud* terjadi pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), dimana terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang merugikan pihak investor dan *stakeholder*. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Setelah diteliti ternyata perusahaan seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus

Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Peembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Sedangkan sebelumnya audit laporan keuangan PT KAI diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI yang telah diaudit akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI. Kasus tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan kurangnya budaya jujur sehingga kinerja auditor internal tidak berperan aktif dalam menyelesaikan masalah (www.anatarnews.com).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* di dalam perusahaan masih kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan kurangnya budaya yang jujur sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan. Selain itu pencegahan *fraud* yang kurang memadai dipengaruhi oleh lemahnya pelaksanaan pengendalian internal yang nantinya berimbas mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Jika pelaksanaan pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakaturan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes Sukrisno 2014:103).

Pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu

proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Azhar Susanto 2013:95).

Pengendalian internal merupakan instrumen yang mampu meminimalisir risiko-risiko perusahaan yang sangat mungkin membawa perusahaan ke arah operasional yang tidak efektif dan tidak efisien. Hal tersebut yang menjadi alasan perusahaan-perusahaan menilai pengendalian internal sangat penting.

Namun beberapa saat ini, masih ada fenomena mengenai kegagalan pelaksanaan pengendalian internal yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Fenomena tersebut yaitu terjadi pada tahun 2017 di mana BPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa BUMN di Indonesia.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan pengelolaan investasi pada PT KAI. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan pengelolaan investasi PT KAI beserta anak perusahaan telah mematuhi perundang-undangan dan ketentuan yang terkait. Namun seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017, BPK masih menemukan banyak permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan maupun kelemahan pelaksanaan pengendalian internal. Hal tersebut ditemukan selama hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi PT KAI dan anak perusahaan tahun buku 2014 sampai triwulan I 2016.

Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi pada PT KAI dan anak perusahaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 19 permasalahan senilai Rp 15,91 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem pelaksanaan pengendalian internal, 10 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan ketidakhematan. (Sumber: <http://kontan.co.id>, 2017)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal perusahaan masih belum dilaksanakan secara optimal sehingga berimbas terganggunya kegiatan operasional perusahaan. Untuk mengetahui memadainya pelaksanaan pengendalian internal suatu perusahaan perlu dilakukan evaluasi. Biasanya evaluasi tersebut dilakukan oleh audit internal, dimana audit internal mempunyai fungsi yaitu memonitor, memantau, dan menilai sistem pelaksanaan pengendalian internal di dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko-risiko atau ancaman yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Dwi Ranti (2013) bahwa perkembangan fungsi *internal audit* sebagai konsultan intern membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan perusahaan, melalui evaluasi *risk management* dan *internal control structure*. Selain itu membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan serta penggunaan sumber daya, termasuk mencegah penyimpangan (*fraud*) atau kesalahan serta ketidakpatuhan (*compliance*).

Fungsi audit internal harus membuat kebijakan yang menunjukkan komitmen untuk mencegah konflik kepentingan dan mengungkapkan segala kegiatan yang dapat mengakibatkan kemungkinan adanya konflik kepentingan. (Setianto dkk., 2004:49 dalam Siang Aggraeni, 2016).

Tentunya bukan hanya pandangan positif saja yang didapat oleh bagian audit internal, namun pandangan negatif akan selalu ada bagi pihak-pihak yang merasa belum puas atas adanya bagian audit internal. Audit internal terkenal dengan aktivitasnya dalam melakukan inspeksi, verifikasi, dan cek dan ricek, bahkan ada yang menyebutkan senang mencari-cari kesalahan (Media Pertamina, 2008). Dalam sebuah paper yang ditulis oleh Roux (2008), dikatakan bahwa auditor internal merupakan sekumpulan orang yang pekerjaannya senang menyela pekerjaan divisi lain untuk memberikan sejumlah pertanyaan dalam sebuah kuesioner lalu mereka akan menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk sekedar berdiskusi dengan CEO. Selain itu, fungsi auditor internal juga dianggap lebih banyak mendatangkan *cost* dibandingkan *benefit* yang diperoleh perusahaan. Fungsi auditor internal dianggap tidak memiliki dampak positif yang signifikan bagi perkembangan perusahaan. Fungsi auditor internal juga dianggap masih jauh dari perannya untuk menjadi seorang konsultan internal (Effendi, 2006). Hal ini berarti usul, saran dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal kurang praktis bagi auditee atau dianggap menyulitkan. Di masa lalu internal auditor tidak perlu mempertimbangkan pentingnya meningkatkan nilai dalam melakukan pekerjaan sehingga pengukuran kinerja fungsi internal audit sangat sulit untuk dilakukan. Fungsi auditor internal

umumnya hanya melakukan verifikasi atas ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur. Tanpa menggunakan jasa auditor internal, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya.

Adapun fenomena yang saat ini sering terjadi yaitu lemahnya pelaksanaan fungsi audit internal di dalam suatu perusahaan, baik Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara, yang sejatinya mereka memiliki eksistensi dalam menjalankan fungsi dari audit internalnya. Dampaknya, kualitas rekomendasi yang menurun dikarenakan tekanan serta profesionalisme dari auditor internalnya seolah dibatasi. Contohnya, kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN dimana BPK menemukan suatu temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai auditor internal PT KAI. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi audit internal tidak memadai atau dengan kata lain kualitas audit internal satuan SPI dirasa masih kurang baik. PT KAI memiliki statistic temuan pengendalian internal yang perlu menjadi perhatian. Berdasarkan LHP Semester II tahun 2013, PT KAI memiliki 78 temuan terkait pengendalian internal dengan jumlah rekomendasi dari BPK sebanyak 223 rekomendasi dan 161 rekomendasi masih belum ditindaklanjuti oleh PT KAI. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pelaksanaan fungsi audit internal pada PT KAI tidak berjalan dengan optimal (www.BPK.com).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Dampaknya pada Pencegahan *Fraud*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya budaya yang jujur dan lemahnya pengendalian internal menyebabkan pencegahan *fraud* tidak terlaksanakan dengan baik.
2. Dalam pemeriksaan BPK pada salah satu perusahaan BUMN masih terdapat kelemahan pelaksanaan pengendalian internal, ketidakhematan, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil LHP menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi audit internal yang belum optimal disebabkan karena tidak ditindaklanjutinya rekomendasi audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana pencegahan *fraud* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Seberapa besar pengaruh fungsi audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa besar pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
7. Seberapa besar pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan *fraud* melalui pelaksanaan pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan *fraud* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh fungsi audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan *fraud* melalui pelaksanaan pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna dan memberikan manfaat baik dari segi kegunaan teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan utama yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh fungsi audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan dampaknya terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan pada BUMN sektor Transportasi di Kota Bandung, sehingga penulis kemudian dapat membandingkan antara teori yang sudah dipelajari di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca serta para peneliti berikutnya sebagai bahan tambahan dan sumber referensi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh fungsi audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan dampaknya terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh dari perkuliahan dalam praktek yang ada di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan menjadi masukan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan yang sama.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung, 40117.